Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VII
Minggu ke-3 Juni
(12 s.d. 18 Juni 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT DAN KESIAPAN SMELTER

T. Ade Surya
Analis Legislatif Ahli Muda
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027 yang ditetapkan oleh Menteri ESDM, cadangan dan produksi bauksit Indonesia berada di peringkat 6 dunia atau 4% dari cadangan dunia. Indonesia memiliki total sumber daya bauksit sebesar 6,6 miliar ton bijih dan 1,1 miliar ton logam, dengan cadangan 3,2 miliar ton bijih dan 520 juta ton logam. Selain itu, Indonesia masih memiliki beberapa wilayah yang teridentifikasi mengandung bauksit, namun belum dieksplorasi. Pada periode tahun 2017-2022, Indonesia menjadi negara pengekspor bauksit terbesar ke-2 di dunia setelah Australia, yang semuanya diekspor ke Tiongkok dalam bentuk bijih bauksit. Ironisnya, di saat yang sama Indonesia mengimpor alumunium atau bauksit yang telah diolah dengan harga yang berkali lipat lebih tinggi.

Per tanggal 10 Juni 2023, pemerintah resmi memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur ekspor mineral mentah hanya dapat dilakukan paling lama 3 tahun sejak aturan berlaku. Kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini utamanya dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi dalam upaya peningkatan nilai tambah produk. Kementerian ESDM menjamin kebijakan larangan ekspor mineral mentah, termasuk bijih bauksit, telah melalui kajian mendalam sehingga tidak akan berdampak signifikan terhadap aktivitas di sektor industri terkait. Kementerian ESDM pun menjamin keberadaan fasilitas smelter bauksit mampu menyerap produksi bijih bauksit yang dihasilkan dari penambangan. Diestimasikan, hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah bijih bauksit hingga USD1,9 miliar dengan manfaat sebesar USD1,5 miliar dan menyerap tenaga kerja sekitar 7.600 orang.

Namun, dari total 12 smelter bauksit yang direncanakan, baru 4 smelter bauksit yang telah beroperasi, yaitu smelter bauksit milik PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi). Sementara 8 smelter bauksit lainnya masih dalam proses pembangunan. Bahkan 7 dari 8 smelter bauksit tersebut yang sebelumnya dilaporkan telah mencapai tahap pengerjaan 32-66%, ternyata masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti karena masih berupa tanah lapang. Permasalahannya kemudian, rata-rata produksi bijih bauksit saat ini mencapai 31 juta ton, sedangkan 4 smelter yang telah beroperasi hanya mampu menyerap sekitar 13-14 juta ton bijih bauksit. Dengan lambannya progres pembangunan smelter bauksit dan telah berlakunya larangan ekspor bijih bauksit maka selain dapat dipastikan sudah ada pelaku usaha yang menghentikan aktivitas tambangnya karena tidak ada kontrak ke smelter bauksit yang telah beroperasi, kondisi ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan sangat merugikan.

Pemerintah sebenarnya telah memprediksi dampak negatif larangan ekspor bijih bauksit, seperti berkurangnya pendapatan ekspor dan penerimaan negara dari royalti, produksi

bauksit yang tidak terserap ataupun pengurangan produksi bauksit secara besar-besaran, dan tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Namun, semua dampak tersebut seharusnya dapat diminimalisir, di antaranya dengan mendorong percepatan pembangunan smelter bauksit melalui pemberian insentif dan mengoptimalkan kapasitas smelter bauksit yang telah beroperasi. Sejalan dengan itu, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan investasi di industri hilir yang membutuhkan bauksit sebagai bahan bakunya agar tercipta pemanfaatan bauksit yang berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Atensi DPR

Pemerintah telah resmi memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dalam upaya mendorong hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah produk. Namun, dari total 12 smelter bauksit yang direncanakan, baru 4 smelter bauksit yang telah beroperasi. Sementara 8 smelter bauksit lainnya masih dalam proses pembangunan dan bahkan 7 dari 8 smelter bauksit tersebut ternyata masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dari DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI karena rata-rata produksi bijih bauksit saat ini mencapai 31 juta ton, sedangkan 4 smelter yang telah beroperasi hanya mampu menyerap sekitar 13-14 juta ton bijih bauksit. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan atas pembangunan smelter bauksit yang telah direncanakan dan meminta pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan smelter bauksit tersebut. Komisi VII DPR RI juga perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasi di industri hilir yang membutuhkan bauksit sebagai bahan bakunya.

Sumber

asiacommerce.id, 12 Juni 2023;
ekonomi.bisnis.com, 12 Juni 2023;
finance.detik.com, 12 Juni 2023; dan
Kontan, 14 Juni 2023.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial

EDITOR
Polhukam Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023